

Materi Rangkuman ini dapat dikutip untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan mencantumkan keterangan sumber "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute"

TEMA : Evaluasi Sosialisasi Peserta Pemilu dan Upaya Mendorong Kampanye Pemilu 2024 yang Informatif dan Edukatif

Pemateri :

1. Lucius Karus- Peneliti Formappi
2. Mahretta Maha- Sekretaris Advokasi Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas
3. August Mellaz- Anggota KPU RI
4. Arfianto Purbolaksono- Manajer Riset dan Program TII
5. Hendrika Ferdinandus- Perwakilan KPU RI

Moderator : Astari Yanuarti- Co-Founder Redaxi

Partisipan : Diskusi ini diikuti oleh peserta dengan berbagai latar belakang yang berbeda, seperti pemerintah, media, NGO, dan masyarakat umum lainnya.

PEMBAHASAN

Arfianto Purbolaksono

- Penyelenggara pemilu belum sepenuhnya mengimplementasikan PKPU. Hal ini misalnya tercantum dalam beberapa pernyataan pengurus KPU. Di PKPU tidak dituliskan bahwa materi kampanye boleh mencantumkan gambar-gambar misalnya gambar atau foto sekretaris jendral partai. Tapi dalam implementasinya mencantumkan.
- Banwaslu juga belum secara aktif melakukan inspeksi terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu.
- Implementasi PKPU belum maksimal.
- Rekomendasi yang disampaikan adalah adanya penyatuan visi misi antara KPU dan Bawaslu agar cara pandangnya juga seragam dalam hal pelaksanaan maupun pengawasan.
- Penguatan masyarakat sipil merupakan hal penting agar bagaimana kedepannya dalam setiap tahapan masyarakat juga turut aktif dalam mengawal pemilu.

Mahretta Maha

- Disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan dalam hal fisik maupun mental dalam melakukan aktivitas-aktivitas lain.
- Sosialisasi pemilu yang ramah disabilitas sudah sering dilakukan oleh Lembaga penyelenggara pemilu namun sayangnya belum melibatkan organisasi penyandang disabilitas. Hal ini penting dilakukan karena menurutnya yang paling tahu tentang kelompok disabilitas adalah teman-teman disabilitas itu sendiri.
- Materi-materi yang disampaikan Ketika ada diskusi dengan teman-teman disabilitas juga harus disampaikan dengan cara yang mudah dipahami disabilitas. Menggunakan bahasa yang tidak sulit.
- Rekomendasi yang disampaikan adalah, sosialisasi pemilu bisa berjalan dengan lebih baik. Bahkan harapannya kedepan nanti KPU bisa membawa topik-topik disabilitas dalam misalnya diskusi-diskusi atau misalnya acara debat capres.

Lucius Karus

- Sosialisasi tidak diakodasi dalam PKPU sebagai tahapan pemilu. Disitu adalah letak ironisnya karena masa-masa sebelum kampanye resmi tidak diberi nama. Sedangkan, banyak calon peserta pemilu yang sudah melakuka “kampanye” walaupun secara resmi tidak diakui.
- Seharusnya apabila KPU ingin mencantumkan sosialisasi sebagai salah satu tahapan pemilu, harus juga diakomodasi dalam PKPU dan diatur secara jelas. Sangat disayangkan ada waktu yang sangat lama namun tidak diatur.
- Tidak heran apabila kemudian banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di jalan. Misalnya spanduk-spanduk besar yang menyampaikan visi-misi partai, program yang akan dijalaninya hingga citra diri.
- Masa kampanye dan sosialisai definisinya harus dibedakan.
- Seakan-akan definisi kampanye dibuat sebagai sebuah ajakan. Padahal secara mendasar definisi kampanye adalah bagaimana kemudian meyakinkan orang untuk mau memilih.
- Sosialisasi harus dimaknai tidak hanya sebagai salah satu program KPU saja, tapi juga bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat meningkat.

Hendika Ferdinandus

- Terkait sosialisasi dan Pendidikan pemilu, KPU memiliki biro tersendiri.
- Menurutnya, KPU sudah meregulasi adanya proses sosialisasi untuk internal partai sebelum masa kampanye dibuka. Hal tersebut sudah termasuk apa saja yang boleh disampaikan dalam masa tersebut misalnya seperti visi misi partai, materi dan lain-lain. Kendati demikian, KPU

menyampaikan bahwa mereka sudah mengatur pelarangan penyampaian citra diri dan program dengan alat peraga kampanye apapun.

FORUM DISKUSI

Mbak Tari

1. **Bagaimana terkait sosialisasi yang diimplementasikan dalam bentuk papan reklame dan banner-banner yang kita lihat di jalan?**

Jawaban:

- KPU merasa tidak bisa mengatur penurunan baliho-baliho tersebut karena itu adalah ranah Bawaslu. Apabila memang ditemukan pelanggaran, maka mekanisme pelaporannya juga ke Bawaslu.

Ibu Puji Astuti

1. **Bagaimana TNI dan Polri ini bisa maju ke pemilu karena peraturannya berubah?**
2. **Bagaimana antisipasi petugas TPS meninggal akibat banyaknya beban kerja?**

Jawaban:

- KPU sudah banyak melakukan simulasi terkait pencoblosan sesungguhnya di beberapa daerah mulai dari pendaftaran sampai perhitungan suara. Menurutnya, karena 2019 adalah pemilu pertama yang dilaksanakan secara serentak, KPU mengakui bahwa hal tersebut memang ada unsur dari kurangnya persiapan KPU. Dalam menanggapi pertanyaan terkait pencalonan TNI dan Polri, KPU mengakui belum mempelajari lebih jauh terkait kebijakan tersebut.
- Lusius Karus juga menambahkan bahwasannya KPU tidak hanya menyoroti verifikasi administratif berupa surat pengunduran diri. Tapi lebih dari itu, juga perlu adanya verifikasi faktualnya apakah yang terkait masih menjabat atau tidak.

Boni

1. Apakah ada kemungkinan KPU mengumumkan pengunduran diri anggota TNI/Polri/PNS
2. Bagaimana asuransi dan proteksi ini disosialisasikan kepada anggota dan pelaksana di TPS

Jawaban:

- KPU mengakui kurang memahami bagaimana asuransi dikelola karena menurutnya itu adalah pekerjaan biro SDM atau biro logistik.
- Lusius Karus menambahkan bahwa gaji dan tunjangan petugas TPS naik secara signifikan. Namun yang perlu disoroti sebenarnya adalah proses yang sangat ruwet mulai dari provinsi, kabupaten/kota. KPU harus bisa memastikan persyaratan, bisa menjawab setiap kebutuhan, sehat jasmani dan Rohani dan tentunya berkualitas sebagai petugas TPS.
- Arfianto Purbolaksono menambahkan bahwasannya TII lebih menyoroti bagaimana KPU dan Bawaslu bisa memaksimalkan sosialisasi teknis. Persoalan yang dihadapi adalah setiap orang Ketika di lapangan memiliki isi pikiran dan standar kerja yang berbeda-beda.

Geltina

1. Bagaimana cara KPU menjaring dan mengawasi agar calon kandidat tidak memakai dana gelap untuk kampanye?

Jawaban:

- Terkait dana kampanye, saat ini peraturan terkait dana kampanye masih dilakukan harmonisasi. Namun semua pengeluaran peserta pemilu harus dilaporkan ke KPU.

Asrul:

1. Kenapa tidak dilakukan harmonisasi peraturan antar penyelenggara pemilu?

Jawaban:

KPU dan Bawaslu sudah membuat MoU bersama.

Benni Innayatullah

Sistem pemilu sangat jauh dari ideal, waktu kampanye pendek tapi peraturan juga dibatasi. Sehingga menurutnya peraturan KPU sekarang malah memihak pengusaha dan incumbent (petahana).

Closing Statement

1. Mbak Retta:

Sebaiknya teman-teman di KPU bisa memberikan edukasi terlebih dahulu kepada pemilih dan petugas-petugas di TPS.

2. Mbak Ika:

PKPU Kampanye sudah diterbitkan dan KPU akan membuat juknis untuk merinci setiap tahapan pelaksanaan kampanye.

3. Arfianto Purbolaksono:

Kampanye harus dilihat secara jelas dan menyeluruh. Definisinya diperjelas dan aturannya diluruskan Kembali.

4. Lusius Karus:

Aturan dibuat kuat karena justru untuk membatasi ruang pergerakan orang-orang yang kuat baik secara finansial dan lain-lain.

Catatan :

1. *Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIAN FORUM dapat diakses di <http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum>*
2. *Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber informasi dari "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute".*

~ TERIMA KASIH ~